UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# BAB II

# KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

## A. Kajian Teori

### 1. Apresiasi

Istilah apresiasi berasal dari bahasa latin *apreciatio* yang berarti mengindahkan. Dalam konteks yang lebih luas, istilah apresiasi menurut *gove* mengandung makana yaitu pengenalan, melalui perasaan atau kepekaan batin dan pemahaman dan pengakuan terhadap nilai-nilai keindahan yang diungkapkan pengarang.[5]

Apresiasi secara umum adalah suatu penghargaan atau penilaian terhadap sesuatu karya tertentu.[6]

### 2. Kelompok Swadaya Masyarakat ( KSM )

KSM ( Kelompok Swadaya Masyarakat ) merupakan kelompok yang dibentuk oleh kelompok masyarakat itu sendiri, dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat ke masyarakat, kelompok-kelompok itu di bentuk oleh apa yang di inginkan masyarakat.

Kelompok Swadaya Masyarakat ( KSM ) ini di mana antar anggotanya dapat saling bantu, saling memperkuat, dan saling belajar untuk bersama-sama keluar dari belenggu kemiskinan. Kesatuan dalam KSM ini didasari oleh ikatan pemersatu, antara lain kesamaan kepentingan dan kebutuhan, kesamaan kegiatan, kesamaan domisili yang mengarah pada upaya mendorong tumbuh berkembangnya modal sosial.

---

[5] Aminuddin, *Pengantar Apresiasi Sastra*, ( Bandung: Sinar Baru 2014 ), Hlm 34

[6] Htttp://Hilman 2008.Wordpress.Com/2009_/06_19_/Apresiasihari Jumat Jam 17.20 Wib 27/10/2017

KSM ini merupakan kegiatan awal proses pembelajaran di tingkat masyarakat bertumpu pada kelompok. Kegiatan ini merupakan proses identifikasi dan penentuan kelompok masyarakat yang akan didampingi. Keputusan apakah satu kelompok bisa didampingi atau tidak harus merupakan kesepakatan bersama seluruh anggota kelompok dan pelaku program penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan/desa.

Dengan adanya KSM akan menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk mendapatkan kembali ikatan-ikatan pemersatu sebagai media membangun solidaritas sosial sehingga masyarakat mampu memecahkan persoalan-persoalan bersama secara mandiri melalui pembelajaran bertumpu pada kelompok.[7]

Maka dari itu peran dari KSM juga mencakup untuk melancarkan kehidupan dan perekonomian masyarakat yang lebih baik. Berlandasan undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 28H Ayat 1 menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Ayat tersebut menunjukan bahwa tinggal di sebuah hunian dengan lingkungan yang layak merupakan hak dasar yang harus dijamin pemenuhannya oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara.

Masyarakat di kelurahan Cinta Raja terdapat berbagai macam kebudayaan yang dibentuk adat istiadat dimana setiap suku bangsa memiliki adat istiadat masing-masing. Masyarakat kelurahan Cinta Raja yang ada

[7] http://jatim25.blogspot.com/searc/label/KSM hari senin jam 19.12 wib 31/01/2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adalah suku Melayu, Minang, Jawa, Batak, Sunda dan lain sebagainy. Namun pekerjaanya juga bermacam-macam mulai dari pegawai negeri, sipil, pedagang, buruh kasar, wiraswasta, dan lain sebagainya. Akan tetapi masih saja terdapat masyarakat ekonomi lemah.

KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat ) yaitu kelompok yang dibentuk oleh kelompok masyarakat itu sendiri, dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat ke masyarakat, lembaga yang bergerak di bidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif.[8]

**3. Peranan**

Peranan merupakan aspek dari suatu kedudukan apabila orang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan:

a. peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam melaksanakan sebagai organisasi.
b. Suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu di masyarakat sebagai organisasi.
c. Peran yang didapat dilakukan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.[9]

Menurut Salnit T.R dan Allen suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang mengatur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Peranan dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan yang diharapkan dari seseorang dalam posisi

[8] http://www.p2kp.org hari jumat jam 11.21 wib 02/02/2017
[9] *Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar*, ( Jakarta: PT. Rajawali Pers 2015 ), hlm 211

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tertentu. Jika dikaitkan dengan peranan sebuah instansi maka dapat diartikan sebagai perangkat perilaku yang diharapkan untuk dilakukan oleh instansi atau kantor yang sesuai dengan posisi kantor.[10]

**4. Fasilitator**

Fasilitator adalah seseorang yang melakukan fasilitasi, yakni membantu mengelola suatu proses pertukaran informasi dalam suatu kelompok. Tanggung jawab fasilitator adalah untuk lebih mengarahkan perhatian pada kelangsungan perjalanan dari pada terhadap tempat tujuan.

Sedangkan dalam ( pedoman pelaksanaan KOTAKU ) Tugas utama tim fasilitator adalah:

1. Mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan sikap, pengetahuan dan perilaku baik individu maupun kelompok.
2. Membantu proses agar masyarakat bisa melakukan identifikasi masalah, memecahkan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi dalam memecahkan masalah mereka termasuk masalah kemiskinan.
3. Mendorong terjadinya saling menghargai, saling peduli dan kerjasama diantara masyarakat dalam memecahkan masalah.
4. Membantu masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam bekerja sama dengan kelompok lain dalam pelaksanaan kegiatan. Misalnya memudahkan masyarakat untuk mendapatkan narasumber yang dibutuhkan.
5. Menberikan informasi-informasi yang dibutuhkan.

[10] Mitra thoha, *kepemimpinan dalam manajemen,* ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2006 ) hlm 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam membatu membangun proses pembelajaran di masyarakat beberapa peran yang bisa dijalankan oleh fasilitator anatara lain:

1. Sebagai Narasumber

   Apabila topik pembahasan merupakan hal baru bagi masyarakat tidaklah tabu. Fasilitator memberikan penjelasan. Memberi tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik kepada masyarakat

2. Sebagai Pelatih

   Peran ini dikatakan apabila dalam proses belajar masyarakat dan fasilitator sama-sama mempunyai pengetahuan dan pengalaman menjadi objek yang sedang dibahas. Fasilitator lebih pada mengatur proses dialog agar mereka menganalisis dan mengembangkan gagasan-gagasan berdasarkan pengalaman masyarakat.

3. Sebagai Mediator

   Seorang fasilitator tidak harus tahu segala hal, justru yang paling penting adalah mengetahui dan menyadari apa yang tidak ia ketahui.

4. Sebagai Pengerak

   Peran ini dijalankan apabila pengetahuan dan pengalaman tertentu hanya dipunya oleh sebagian masyarakat. Fasilitator harus mendorong masyarakat belajar untuk bersedia belajar dari orang lain. Dalam hal ini diperlukan sikap rendah hati dari masyarakat yang merasa lebih berpendidikan dan mempunyai pengetahuan yang lebih yang lainnya. Fasilitator harus mendorong keyakinan nereka bahwa setiap orang pasti punya pengetahuan dan pengalaman yang khas yang bisa dibagi kepada

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang lainnya, sehingga pengalaman dan pengetahuan itu sangat berharga dan memperkaya mereka.[11]

Karakter yang dimiliki oleh seorang fasilitator yakni:kesetaraan, mampu dan jujur, percaya diri, terbuka, sabar, luwes dan tanggap, bisa menyedsuaikan diri, ramah dan menghargai.

Program kotaku adalah program berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari tiga komponen kegiaatan KOTAKU antara lain:

1. Sosial

   Komponen kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah kebutuhan yang diwujudkan dalam bentuk bantuan pendampingan bantuan stimulant dana BLM. Berupa pengembangan kapasitas atau berupa peningkatan sumber daya manusia yang diwujudkan dalam bentuk penelitian-penelitian wira usaha dan keterampilan.

2. Ekonomi

   Kegitan ekonomi yang dilaksanakan dalam KOTAKU adalah pemberian pinjaman bergulir kepada masyarakat miskin melalui KSM untuk menyediakan akses layanan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar dengan kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang biasanya tidak memiliki akses kesumber pinjaman lainnya, guna untuk memperbaiki kondisi ekonomi serta usaha mikro disamping itu membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan

[11] Pedoman BKM, 2002 Hal 7

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menggunakannya secara benar serta memberikan pelatihan-pelatihan bidang keahlian kewirausahaan seperti:

a. Border Atau Jahit

b. Membuatkue

c. Sablon Dan Lain-Lain.[12]

3. Lingkungan

Kegiatan lingkungan ini yaitu pembangunan sarana dan prasarana perumahan yang kumuh, perbaikan jalan, gorong-gorong, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara gotong royong dan lain sebagainya.[13]

**5. Pengertian Pemberdayaan**

a) Pengertian Etimologi

Pemberdayaan atau *empowerment* berawal dari kata daya *(power*). Daya dalam arti kekuatan yang bersal dari dalam, dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu atau kolektif guna mengembangkan daya (potensi) dan kemampuan yang terdapat dalam diri sendiri sehingga mampu melakukan transformasi sosial.[14]

Pemberdayaan adalah proses menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk menentukan masa depan. Pemberdayaan merupakan

[12] Pedoman BKM, 2002 Hal 7

[13] Lawono, Budi. *pedoman pelaksanaan kotaku*, Direktur Jenderal Cipta Karyadepartemen Pekerjaan Umum, Jakarta: 2009 Hal 17

[14] Sri Najiyati, Dkk. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut.* Bogor : 2005. Hal. xiv

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pekerjaan yang membutuhkan waktu, energi, dan komitmen dari semua unsur masyarakat.[15]

Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumberdaya yang berupa: modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran, dll. Agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya.[16]

Winarni dalam Ambar Teguh Sulistiyani mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu[17] :

a) Pengembangan (*enabling*) yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
b) Memperkuat potensi atau daya (*empowerment*), perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.

---

[15] Rosmita dan Aslati. *Ilmu Kesejahteraan Sosial (Teori dan Aplikasi Pengembangan Masyarakat Islam)*. Hal. 38

[16] Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto., 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persfektif Kebijakan Publik,* Bandung: Alfabeta. Hal. 32.

[17] Sulistiyani, Ambar Teguh., 2004.*Memahami Good Governance dalam Persfektif Sumberdaya Manusia,* Yogyakarta:Gaya Media. Hal. 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c) Tujuan akhir dari pemberdayaan adalah memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

d) Defenisi Pemberdayaan Secara Terminologi

1) Menurut Ife pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.

2) Menurut Slamet menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaiana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu di sini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif. Sedangkan indikator pemperdayaan menurut Suharto paling tidak memiliki empat hal yaitu:

a. Merupakan kegiatan yang terencana dan kolektif
b. Kehidupan masyarakat
c. Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung dan
d. Serta dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam pelaksanaanya, pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan, atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju perilaku baru yang lebih baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraanya.

Oleh sebab itu setiap individu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Realitas kesetaraan dan perbedaan individu ini menjadi prinsip dalam melakukan pemberdayaan. Dengan demikian pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk berdaya yang dilakukan secara demokratis agar mampu membangun diri dan lingkungannya dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera.[18]

**6. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang dialami masyarakat yang di tandai oleh kemampuan untuk memikirkan. Dengan demikian untuk menjadi mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan

[18] Dr. oosm, Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, 2014 (ALFABETA BANDUNG), hal :49-50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik material.[19]

Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahab akan memperoleh kemampuan tersebut masyarakat harus menjalani proses belajar. Dengan proses belajar tersebut akan di peroleh kemampuan/daya dari waktu ke waktu. Dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai, untuk mengantarkan kemandirian mereka. Apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan suatu visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik, masyarakat yang ideal.

Tahap-Tahap Pemberdayaan

Sampai kapankah pemberdayaan tersebut harus dilakukan? Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan dilepas untuk mandiri, meski dari jauh agar tidak jatuh lagi. Lihat dari pendapatan tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Tahap-tahap yang dilakukan yaitu:

a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

[19] Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan ,( Gava Media ) hal: 8o*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Tahap transpormasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembanguanan.

c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kepada kemandirian.

**7. Sasaran Pemberdayaan**

Perlu dipikirkan siapa sesungguhnya menjadi sasaran pemberdayaan. Schumacer memiliki pandangan pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin dengan tidak harus menghilangkan ketimpangan struktural lebih dahulu. Masyarakat miskin sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun dengan demikian memberikan. pemaknaan pemberdayaan selanjutnya seiring dengan konsep good govermance. Konsep ini mengetengahkan ada tiga pilar yang hahrus di pertemukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang selaras.

**8. Pendekatan Pemberdayaan**

Akibat dari pemahaman hakikat pemberdayaan yang berbeda-beda, maka lahirlah dua sudut pandang yang bersifat kontradiktif. Kedua sudut pandang tersebut memberikan implikasi atas pendekatan yang berbeda pula di dalam melakukan langka pemberdayaan masyarakat. Pendekatan yang pertama memahami pemberdayaan sebagai suatu sudut pandang konfliktual. Munculnya cara pandang tersebut didasarkan pada perspektif konflik antara pihak yang memiliki daya/kekuasaan di satu sisi, yang berhadapan dengan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pihak yang lemah di sisi lainnya. Pendapat ini diwarnai oleh pemahaman bahwa kedua pihak yang berhadapan tersebut sebagai suatu fenomena kompetisi untuk mendapatkan daya, yaitu pihak yang kuat berhadapan dengan kelompok lemah. Penuturan yang lebih simpel dapat disampaikan, bahwa proses pemberian daya kepada kelompok lemah berakibat pada berkurangnya daya pada kelompok lain.

Pemberdayaan merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia dan masyarakat yang kondisi sekarang belum mampu untuk melepaskan diri perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Kata Sasmita mengatakan konsep pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi, 1, menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling), 2. Memperkuat daya atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat (empowering) 3. Dan memperdayakan mengandung makna melindungi, dalam arti mengupayakan untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan ekspoloitasi dari yang kuat terhadap yang lemah.[20]

**9. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Ekonomi**

Pemberdayaan ekonomian masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/ upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.[21]

---

[20] Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan ,( Gava Media ) hal: 8o ,82 ,83, 90-91*

[21] Dr. Effendi M. Guntur, *pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: Sagung Seto, 2009), hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Karena persoalan atau isu strategis perekonomian masyarakat bersifat lokal spesifik dan problem spesifik, maka pendekatan friedmann, sebenarnya pendekatan keluarga. Friedmann memiliki pandangan bahwa setiap rumah tangga memiliki tiga macam kekuatan, yaitu kekuatan sosial, kekuatan politik, dan kekuatan psikologis. Pandangan friedmann ini kemuadian menghasilkan rumusan mengenai pemberdayaan sebagai proses untuk masyarakat lemah untuk memperoleh kekuatan dan akses terhadap sumberdaya.[22]

Konsep dan operasional pemberdayaan perekonomian masyarakat tidak dapat diformulasikan secara generik. Usaha memformulasikan, pendekatan, dan bentuk operasinal pemberdayaan ekonomi masyarakat secara generic, memang penting, tetapi yang jauh lebih penting, adalah pemahaman bersama secara jernih terhadap karakteristik permasalahan ketidakberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Sebab dengan pemahan dengan yang jernih mengenai ini, akan lebih prokduktif dalam memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan perekonomian masyarakat yang sesuai dengan karakteristik permasalahan lokal.[23]

Salah satu maslah yang dihadapi oleh masyarakat lemah adalah dalam hal akses untuk memperoleh modal. Dalam pasar uang, masyarakat perdesaan baik yang petani, buruh, pengusaha mokro, pengusaha kecil, dan pengusaha menegah, terus didorong untuk meningkatkan tabungan. Tetapi ketika mereka membutuhkan modal, mereka diperlakukan diskriminatif oleh lembaga keuangan. sehingga yang terjadi adalah aliran modal dari masyarakat lemah ke

[22] Dr. Effendi M. Guntur, *Ibid*, hlm. 6.
[23] Dr. Effendi M. Guntur, *Ibid*, hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat yang kuat. Lembaga keuangan atas posisinya sebagai perantara, maka didalamnya berbagai resiko dengan *borrowers*, memberikan informasi kepada *borrowers*, dan menyediakan likuiditas. Kenyataan yang terjadi, kepada masyarakat lemah dan pengusaha kecil, perlakuan atas ketiga hal tersebut juga diskriminatif. Dan atas perlakuan yang tidak adil itu, masyarakat tidak memiliki kekuatan tawar menawar dengan pihak lembaga keuangan., seperti diketahui bahwa salah satu dari tujuan akhir pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah meningkatkan pendapatan masyarakat lemah. Pendapatan masyarakat pada umumnya berasal dari dua anasir, yaitu dari upah/ gaji dan dari surplus usaha.

Dari anasir upah/ gaji, pada umumnya masyarakat yang tunadaya hanya menerima upah/ gaji rendah. Rendahnya gaji/ upah yang diterima masyarakat tunadaya ini disebabkan karena mereka pada umumnya memiliki keterampilan yang terbatas dan sikap mental yang buruk (*need achievement rendah,tidak disiplin*). Rendahnya keterampilan masyarakat tunadaya disebabkan karena akses atau kesempatan mereka untuk mendapatkan pelayanan pendidikannya pada umumnya buruk. Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang cukup realistis untuk masyarakat pekerja yang tunadaya, adalah melalui *affirmative action* ( misalnya subsidi pendidikan bagi masyarkat tunadaya ) di bidang pendidikan. Untuk *affirmative action* bagi masyarakat tunadaya, maka

pemerintah harus memiliki dana. Untuk mendapatkan dana dapat dilakukan melalui kebijakan fiscal, misalnya dengan pajak progresif.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Demikian pula dari anasir surplus usaha. Sebagagian besar masyarkat tunadaya tidak memiliki usaha, atau kalaupun memiliki, maka mereka menghadapi kendala dalam hal modal, dan atau tanah, dan atau sumber kemampuan sumber daya manusia dan distribusi ( baik pasar input maupun pada pasar auput atau pasar barang ). Keempat kendala itu saling berkaitan satu sama lain. Oleh sebab itu dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dari sisi surplus, usaha, maka perlu ditangani secara konprehensif.

Penaganan kendala modal, kendala distribusi, dan kendala tanah tidak seluruhnya dapat dilakukan melalui pendekatan ekonimi semata. Karena banyak demensi-demensi pilotik yang harus ditangani. Pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat dilakukan tanpa pemberdayaan politik dan kebijakan politik, demikian dikemukakan oleh sharul effendi walikota jakarta selatan yang juga sebagai dosen sosiologi politik diberbagai perguruan tinggi dengan penuh semangat.

Pemikiran, jika diterima, akan menuntut kepada kita semua, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat haruus menjadi komitmen dan kebijakan semua departenmen. Sebab sekali lagi, dimensi yang harus ditangani dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, bersifat multi.

Sekarang bagaimana dengan konsep pemberdayaan ini dikalangan birokrasi pemerintah. Walaupun uraian berikut tidak mewakili pemahaman birokrasi pemerintah secara keseluruhan, tetapi paling tidak dapat membantu kita untuk memahami konsep pemberdayaan menurut birokrasi pemerintah. Dari berbagai tulisan Sumodiningrat, menyatakan konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1) Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakya. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berasal pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. pengertian rakyat dalah semua warga negara.
2) Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3) perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian langkah-langkah proses struktur, meliputi:
   a. Pengalokasian sumber pemberdayaan sumber daya;
   b. Penguatan kelembagaan;
   c. Penguasaan teknologi; dan
   d. Pemberdayaan sumber daya manusia.
4) Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stumulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang ertat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5) Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: pelaku
   a. Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada akset produksi ( khusus nya modal
   b. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar price tarer
   c. Pelayanan pendidikan dan kesehatan
   d. Penguatan industri kecil
   e. Mendorong munculnya wirausaha baru
   f. Pemerataan spasial
6) Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup:
   a. Peningkatan akses bantuan modal usaha
   b. Peningkatan akses pengembangan sdm; dan
   c. Peningkatan akses ke sarana dan prasarana yg mendukung lansung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Berdasarkan enam butir pokok konsep pemberdayaan masyarakat ini dapat disimpulkan, bahwa :

1. Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan daun saja, atau cabang saja, atau batang saja, atau akar saja; karena permasalahan yang dihadapi memang ada pada masing-masing aspek.
2. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, tetapi juga perlu ada penguatan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumberdaya manusianya, penyediaan prasarananya, dan penguatan posisi tawarnya.

3. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat, perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan mendiskri minasikan ekonomi kuat; untuk itu kemitraan antar usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar adalah jalan yang harus ditempuh.
4. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern, efisien; dan
5. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak dapat dilakukan melalui pendekatan individu, melainkan dibutuhkan melalui pendekatan kelompok.[24]

a ) Praktek Pemberdayaan Bidang Ekonomi Saat Ini

Berdasarkan berbagai konsep mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, seperti telah dibahas di depan, sekarang kita akan melihat, bagaimana konsep ini dipraktikan. Dari berbagai program dan atau proyek pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, apakah itu program inpres desa tertinggal (idt), proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal ( p3dt ), proyek pengembangan kecamatan kecamatan (ppk), proyek pengembangan kawasan desa-kota terpadu (parul), pengembangan ekonomi masyarakat lokal (peml/led) dan program pemberdayaan daerah mengatasi dampak krisis ekonomi (pdmdke), secara

[24] Dr. Effendi M. Guntur, *Ibid*, hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

umum memiliki kemiripan dimensi pendekatan, seperti misalnya: bantuan modal bergulir, bantuan pembangunan prasarana, pengembangan kelembagaan lokal, penguatan dan pembangunan kemitraan usaha, dan fasilitas dari pendamping eksitus.

1. Bantuan modal bergulir

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah pemodalan. Lambannya akumulasi capital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menegah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha di luar sektor ekstraktif.

Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemeberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dalam memang harus di lakukan.

Ada dua hal yang perlu kita cermati bersama. Pertama, bahwa lemahnya ekonomi masyarakat tunadaya ini bukan hanya terjadi di masyarakat yang memiliki usaha mikri, kecil, dan menegah, tetapi juga masyarakat yang tidak memiliki faktor produksi, atau masyarakat yang pendapatannya hanya dari upah/gaji. Karena tidak mungkin semua anggota masyarakat tunadaya dapat dan memilki talenta untuk dijadikan pengusaha, maka bantuan modal tidak akan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat pekerja. Dalam praktik pemberdayaan ekonomi masyarkat, tanpaknya pemberdayaan untuk masyarakat pekerja ini perlu dipikirkan bersama.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kedua, yang perlu dicermati dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek permodalan ini adalah:

a. Bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat
b. Bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sisitem yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menegah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan
c. Bagaimana skema pengguanaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian susbsiten atau ekonomi *kere.* Tiga hal ini penting untuk dipecahkan bersama. Inti pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat. Pemberian hibah modal kepada masyarakat, selain kurang mendidik masyarakat untuk bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, juga akan dapat mendistorsi pasar uang. Oleh sebab itu, cara yang cukup elegan dalam memfasilitasi pemecahan masalah permodalan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menegah, adalah dengan menjamin kredit mereka di lembaga keuangan yang ada, dan atau memberi subsidi bunga atas pinjaman mereka di lembaga keuangan. cara ini selain mendidik mereka untuk bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit, juga dapat menjadi wahana bagi mereka untuk terbiasa bekerjasama dengan lembaga keuangan yang ada, serta membuktikan kepada lembaga keuangan bahwa tidak ada alasan untuk diskriminatif dalam pemberian pinjaman.

Sistem atau kebijakan yang kondusif untuk meperluas akses usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menegah ke lembaga keuangan, sebenarnya

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah cukup banyak, seperti Kredit Usaha Tani ( KUT ), kredit kepada koperasi (kkop), kredit modal kerja pengembangan bank perkreditan rakyat (kmk-bpr), kredit kepada koperasi primer untuk anggota (kkpa), kredit trans kawasan timur (kkpa pir trans kri), kkpa- bagi hasil, kredit pengusaha kecil dan mikro (kpkm), kredit modal kerja usaha kecil dan menegah (kmk-ukm), dan masih banyak lagi lainnya. *Affirmative action* untuk masyarakat dalam pengembangan ekonomi, melalui mekanisme pasar ini jauh lebih baik, bila disbanding dengan pemberian dana bergulir, ini relevan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi rakyat yang akan menjadikan ekonomi rakyat sebagai ekonomi yang tangguh, mandiri, berdaya saing, dan modern.

2. Bantuan pengembangan prasarana

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau kalupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab itu, komponen penting dalam usaha penberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokal produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, poengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendudkung desa tertinggal, memang strategis.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bantuan pendampingan

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar. Yang perlu dipikirkan bersama adalah mengenai siapa yang paling efektif menjadi pendamping masyarakat. Pengalaman empirik dari pelaksanaan IDT, P3DT, DAN PPK, dengan adanya pendamping eksitu, ternyata menyebabkan biaya transaksi bantuan modal menjadi sangat mahal. Selain itu, pendamping eksitu yang diberi upah, ternyata juga masih membutuhkan biaya pelatihan yang tidak kecil. Oleh sesab itu, untuk menjamin keberlanjutan pendampingan, sudah saatnya untuk dipikirkan pendampingan insitu, bukan pendamping eksitu yang sifatnya sementara. Sebab proses pemberdayaan bukan proses satu dua tahun, tetapi proses puluhan tahun.

4. Penguatan kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, oleh sebab itu, semenjak tahun 80-an, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasanya dalah, akumulasi capital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi capital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membagun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam berapa hal logika ini benar, tetapi tidak benar untuk hal yang lain. Pengalaman empiris telah membuktikan hal ini. Pendekatan kelompok memang efektif untuk wahana belajar dan wahana refleksi. Tetapi pendekatan kelompok jarang berhasil.

Pada tahun 80-an ada NGO besar di jakarta yang pernah memiliki dampingan kelompok usaha ekonomi sampai lebih dari dua ribu kelompok usaha bersama. Ketika kelompok tersebut didampingi oleh fasilitator dan diberi bantuan modal bergulir, aktivitas ekonomi melalui kelompok berjalan cukup baik. tetapi ketika ditinggalkan pendampingnya dan tidak ada lagi bantuan modal, maka kelompok-kelompok ini akhirnya bubar.

Dengan demikian, pengertian pengembangan kelembagaan ekonomi, perlu didefinsikan kembali. Kalau pendekatan kelompok dimaksudkan untuk tujuan akumulasi modal atau membangun kelembagaan keuangan tersendiri, maka itu tidak mudah untuk mencapainya. Yang paling realistis adalah bila pengelompokan atau pengornisasian ekonomi diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal ke lambaga keuangan yang telah ada, dan untuk membangun skala usaha yang ekonomis.

Aspek kelembagaan yang lain adalah dalam hal kemitraan antar skala usaha dan jenis usaha, pasang barang, dan pasar input produksi. Ketiga aspek kelembagaan ini penting untuk ditangani dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Penguatan Kemitraan Usaha

Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan menegasikan yang lain, tetapi *give power to everybody*.

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah.

Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi masing-masing pihak dapat di berdayakan.

## B. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu yang relevan di maksud adalah kupasan singkat yang dilakukan oleh penelitian terhadap penelitiapenelitian terdahulu guna untuk mengetahui aspek-aspek mana saja yang telah diteliti.

1) Yurniati Mahasiswi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau 2015 meneliti dengan judul Peran Fasilitator PNPM-MP dalam Mengerakan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kelompok Swadaya Masyarakat ( KSM ) Di Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai. Dimana Yurniati memfokuskan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penelitiannya peran fasilitator dalam mengerakan kesadaran masyarakat KSM.

2) Ratnawati, Mahasiswi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau 2012 meneliti dengan judul Peran Dana Usaha Ekonomi Desasimpan Pinjam (UED-SP ) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Dimana Ratnawati memfokuskan penelitiannya tentang Peran dana usaha simpanpinjam dalam meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut.

3) Halimah Tunsadiah, Mahasiswi Jurusan PMI UIN SUSKA RIAU 2015 meneliti dengan judul peran fasilitator terhadap pemberdayaan masyarakat melalui pnpm-mp di kecamatan tanpan kota pekanbaru. Dimana dalam penelitian ini memfokuskan pada bagai mana peran fasilitator dalam memberdayakan masyarakat melalui program PNPM-MP.

## C. Defenisi Konsepsional dan Operasional variabel

### 1. Konsepsional

Apresiasi yaitu suatu penghargaan yang diberikan kepada seseorang atas prestasi yang ia miliki dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan berhasil.

Peranan fasilitator ada dua yaitu:

a. Tugas utama tim fasilitator

b. Dalam membantu membangun proses pembelajaran di masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**2. Operasional variabel**

Operasional variabel adalah konsep yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap konsep teoritis. Dilatarbelakangi oleh kerangka teoritis sebelumnya, selanjutnya penulis merumuskan konsep operasional sebagai tolak ukur atau indikator dalam penelitian.

a. Tugas utama fasilitaor masyarakat
   1. Mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan sikap, pengetahuan dan perilaku baik individu maupun kelompok.
   2. Membantu proses agar masyarakat bisa melakukan identifikasi masalah, memecahkan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi dalam memecahkan masalah mereka termasuk masalah kemiskinan.
   3. Mendorong terjadinya saling menghargai, saling peduli dan kerjasama diantara masyarakat dalam memecahkan masalah.
   4. Membantu masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam bekerja sama dengan kelompok lain dalam pelaksanaan kegiatan. Misalnya memudahkan masyarakat untuk mendapatkan narasumber yang dibutuhkan.
   5. Menberikan informasi-informasi yang dibutuhkan.

b. Dalam membantu membangun proses pembelajaran di masyarakat
   1. Sebagai Narasumber
   2. Sebagai Pelatih
   3. Sebagai Mediator
   4. Sebagai Pengerak